

LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT



**PENDAMPINGAN KAJIAN PROSES BISNIS DAN
ARSITEKTUR TIK DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DI KABUPATEN LUMAJANG**

TIM PENGUSUL:

Lambang Probo Sumirat, S.Kom., M.Kom.	0712067201
Dwi Cahyono, S.Kom., MT.	0727017301
Yudi Kristyawan, S.Kom., M.Kom	0707027401
Moch Syaiful Riza S.Kom., MM.	0718117203

**UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA
OKTOBER 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Pendampingan Asessment Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optic di Kabupaten Lumajang
2. Nama Mitra : Pemerintah Kabupaten Lumajang
3. Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Lambang Probo Sumirat, S.Kom., M.Kom
 - b. NIDN : 0712067201
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : Teknik Informatika
 - e. Bidang Keahlian : Sistem Informasi
 - f. Alamat surel/email : lambang@unitomo.ac.id
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 3 orang
 - b. Nama Anggota I/ Bidang Keahlian : Dwi Cahyono, S.Kom., MT/ Jaringan Cerdas Multi Media
 - c. Nama Anggota II/ Bidang Keahlian : Yudi Kristyawan, S.Kom., M.Kom/ Sistem Informasi
 - d. Nama Anggota III/Bidang Keahlian : Moch Syaiful Riza S.Kom., MM/E-Government
 - e. Mahasiswa yang Terlibat : Indah Kurniyawati
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Lokasi Mitra : Dinas Komunikasi & Informatika
 - b. Kabupaten : Kabupaten Lumajang
 - c. Propinsi : Jawa Timur
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : 150 Km
6. Luaran yang Dihasilkan : Laporan Akhir
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
8. Biaya Total : Rp. 10.000.000,-
 - Sumber DIPA UNITOMO : Rp.
 - Sumber Pemda : Rp.
 - Sumber CSR : Rp.
 - Sumber Lain (Fakultas/Mandiri) : Rp. 10.000.000,-

Mengetahui,



Achmad Choiron, S.Kom., MT
NPP. 97.01.1.266

Surabaya, 07 Oktober 2019
Ketua Tim Pengusul,

Lambang Probo Sumirat, S.Kom., M.Kom
NPP. 09.01.1.370

RINGKASAN

Mengacu kepada dokumen Master Plan TIK Kabupaten Lumajang 2018-2022, yaitu melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk membentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu untuk mencapai sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, terukur dan berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Lumajang yang berdaya saing, makmur dan sejahtera. Perkembangan dunia IT yang cepat dan masif dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemerintahan Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan teknologi IT diharapkan kabupaten Lumajang dapat meningkatkan pengelolaan kota serta memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada pengabdian ini, kami melakukan kegiatan pengabdian dengan cara melakukan pendampingan Kajian Proses Bisnis dan Arsitektur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten Lumajang Smart-city untuk meningkatkan layanan dan informasi bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.

Kata kunci : Proses Bisnis, Arsitektur TIK.

PRAKATA

Kemajuan suatu pemerintahan dalam era digital bergantung pada kemampuan masyarakatnya memanfaatkan TIK untuk meningkatkan produktivitasnya. Penguasaan informasi tidak cukup hanya sekedar menguasai tetapi diperlukan kecepatan dan ketepatan serta utilisasi yang tepat. Pembangunan TIK memberikan nilai strategis bagi eksistensi sebuah pemerintahan dalam mewujudkan visinya ke depan. Melalui perencanaan pembangunan TIK yang terarah diharapkan dapat memberikan pedoman strategis bagi semua pihak yang terkait dengan pembangunan TIK di Indonesia.

Melalui Visi dan Misinya, Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang melaksanakan proses transformasi menuju Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik (e-Government/SPBE) yang menuntut adanya perubahan- perubahan yang inovatif. Hal ini sesuai arahan Pemerintah pusat yang mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) / Master Plan Pengembangan e-Government beserta rekomendasi pengembangannya yang bertujuan agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

Sebagai langkah awal dalam merealisasikan Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2022 adalah dengan melakukan kajian terhadap Proses Bisnis dan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan mengetahui proses bisnis dan arsitektur semua aplikasi TIK yang dimiliki dan digunakan sehingga diharapkan dapat menghasilkan solusi dalam mengintegrasikan data dalam konsep BIG DATA yang terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga diharapkan data, informasi dan layanan public dapat dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang.

Dokumen ini pada akhirnya perlu di tinjau ulang secara berkala untuk memastikan perencanaan ini dilaksanakan dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Lumajang serta perkembangan teknologi dimasa yang akan datang.

Lumajang, 07 Oktober 2019

Pelaksana

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	III
Ringkasan.....	IV
Prakata	V
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra	1
Bab 2. Target Dan Luaran.....	2
Bab 3. Metode Pelaksanaan	3
3.1. Lokasi Dan Jadwal Kegiatan.....	3
3.2. Metode Pelaksanaan	4
Bab 4. Hasil Dan Luaran Yang Dicapai.....	5
4.1. Hasil	5
4.2. Luaran	6
Bab 5. Simpulan Dan Saran	11
Daftar Pustaka	12
Lampiran.....	13
Lampiran 1. Foto Kegiatan	13

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Penduduk Kabupaten Lumajang yang berjumlah sedikit di atas 1 juta jiwa, didominasi oleh penduduk usia produktif usia 15-64 tahun dengan persentase di atas 68%. Hal ini merupakan faktor yang menjanjikan untuk pertumbuhan Kabupaten Lumajang ke depan. Perbedaan kepadatan yang mulai tinggi antara pusat kota (3135 jiwa/km²), dan di pinggiran (218 jiwa/km²) dapat menjadi pendorong penerapan sistem berbasis TIK untuk efisiensi.

Kabupaten Lumajang merupakan satu dari provinsi Jawa-timur yang mempunyai statistik menarik, sebagaimana yang digambarkan pada buku Statistik Daerah Lumajang 2017. Kota yang berbatasan dengan kabupaten Jember, Probolinggo, Malang dan Laut Selatan ini memiliki geografi berkontur dengan luas total 1.790,9 km².

Dari sisi pendidikan, sebagian besar penduduk Kabupaten Lumajang telah mengenyam pendidikan, dan hanya di bawah 5% yang belum mengenyam pendidikan. Tetapi survei menunjukkan adanya sekitar 12% penduduk yang masih buta-huruf, walaupun sudah 6% penduduk mengenyam bangku perkuliahan (D1-S3).

Dari aspek pemanfaatan tenaga kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Lumajang masih menyisakan pekerjaan rumah, sehingga penerpaan TIK dalam proses penyediaan pekerjaan menjadi sangat penting.

Industri di kabupaten Lumajang hingga saat ini masih didominasi oleh industri makanan dan minuman, dengan jumlah sekitar 13.000 industri dan melibatkan sekitar 56 ribu pekerja. Dengan total omset sekitar 5 T dan ekspor 1.5 T, membuat industri menjadi kontributor PAD yang cukup baik. Meskipun demikian, kontribusi industri sektor pariwisata masih sangat terbatas, yang ditandai dengan tingkat hunian hotel yang belum efektif.

1.2. Permasalahan Mitra

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, dapat diuraikan beberapa permasalahan mitra yaitu bagaimana mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Benar dan Bersih melalui Pelayanan Publik yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan dengan berdasarkan pada pemanfaatan teknologi IT.

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

Adapun target yang ingin dicapai pada pengabdian masyarakat di Kabupaten Lumajang ini adalah:

- a. Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan konsep pelayanan berbasis IT di lingkup pemerintah Kabupaten Lumajang yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis dan Master Plan serta Roadmap TIK Pemerintah Kabupaten Lumajang, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah Laporan akhir pendampingan Kajian Proses Bisnis dan Arsitektur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lumajang sebagai Kabupaten yang profesional dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan pembangunan, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Lumajang yang berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

3.1. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Adapun lokasi dan jadwal pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Lumajang ini seperti dijelaskan berikut ini:

Lokasi : Kabupaten Lumajang

Waktu Pengabdian : Oktober s/d Desember 2019

Jadwal kegiatan secara garis besar dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Jadwal kegiatan pengabdian pada masyarakat

No.	Kegiatan	Bulan			Pelaksana
		Februari	Maret	April	
1	Survey Pendahuluan	√			Tim pengabdian
2	Koordinasi dengan pihak Pemerintahan Kabupaten Lumajang	√	√		Ketua tim pengabdian
3	Analisa Kebutuhan	√	√		Tim pengabdian
4	Penyusunan rekomendasi		√		Tim pengabdian
5	Penyusunan Laporan Pendahuluan		√		Tim pengabdian
6	Forum Discussion Grup (Laporan Pendahuluan)		√		Tim pengabdian
7	Penyusunan Laporan Akhir			√	Tim pengabdian
8	Forum Discussion Grup (Laporan Akhir)			√	Tim pengabdian
5	Laporan Akhir			√	Tim pengabdian

3.2 Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa :

- a. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk kajian proses bisnis dan arsitektur TIK dalam kegiatan pengabdian ini.
- b. Melakukan survei lapangan ke OPD di lingkungan Kabupaten Lumajang sebagai pelaku atau pengguna aplikasi, dengan melakukan wawancara, diskusi serta pendataan kondisi eksisting aplikasi masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang
- c. Melakukan Analisa proses masing masing aplikasi yang digunakan OPD.
- d. Penyusunan Draft Alur Proses Bisnis dan Arsitektur setiap aplikasi yang digunakan sebagai langkah laporan awal.
- e. Melakukan Forum Group Discusion (FGD) untuk memberikan pemahaman tentang rencana awal Proses Bisnis dan Arsitektur TIK.
- f. Penyusunan Laporan Akhir yaitu dokumen Kajian Proses Bisnis dan Arsitektur TIK secara detail termasuk solusi integrasi system elektronik dalam upaya mewujudkan Lumajang Satu Data yang merujuk kepada Kabupaten Lumajang Smart City.

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil

Berdasarkan kegiatan pendampingan kajian proses bisnis dan arsitektur TIK untuk pemerintahan Kabupaten Lumajang dihasilkan data-data sebagai berikut:

Identifikasi Bisnis Proses dengan melakukan survey terhadap beberapa organisasi pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam table 4.1 Daftar Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.1 Daftar Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

No	OPD
1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Inspektorat
3	Bagian Administrasi Pembangunan
4	BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
5	Bagian Organisasi
6	BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)
7	Badan Kepegawaian

Pada masing masing OPD memiliki Aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktifitas operasional sebagaimana dalam table 4.2 Daftar Aplikasi OPD

Tabel 4.2 Daftar Aplikasi OPD

No	OPD	APLIKASI
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	SPSE SIRUP
2	Inspektorat	SIMAUD SIDU
3	Bagian Administrasi Pembangunan	SMEP
4	BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	MUSRENBANG
5	Bagian Organisasi	E-Sakip
6	BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)	SIPAPBD SIPKD
7	Badan Kepegawaian Daerah	SKP SIPERLU

Dalam menciptakan Sistem Informasi yang terintegrasi dan mengakomodir semua Proses Bisnis tiap – tiap OPD diperlukan upaya yang tidak mudah. Perlu adanya arahan dari pimpinan Pemda Kabupaten Lumajang agar Sistem Informasi terintegrasi ini dapat segera direalisasikan. Dalam hal ini, juga dilakukan survey untuk menentukan Sistem Informasi – Sistem Informasi yang mewakili proses bisnis dimasing-masing OPD. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan dari 7 Organisasi Pemerintah Daerah seperti pada table 4.3:

Tabel 4.3 Daftar Aplikasi OPD

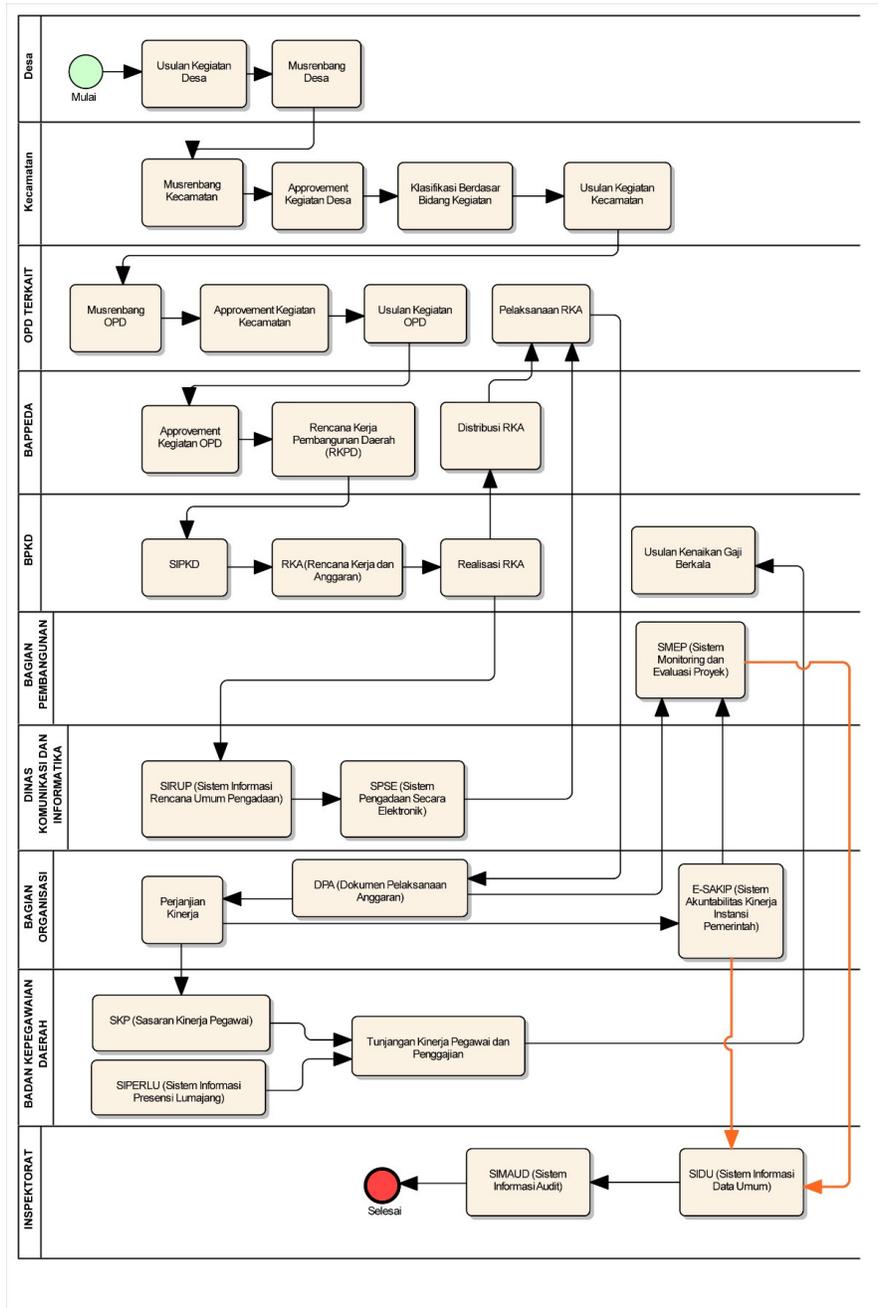
No	OPD	SISTEM INFORMASI	DATA & INFORMASI	
			INPUT	OUTPUT
1	Inspektorat	SIMAUD SIDU	RKA DPA SMEP SPSE	Internal Audit
2	Badan Kepegawaian Daerah	SiMAK SIPERLU	Perjanjian Kinerja	Tunjangan Kinerja Penggajian
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	SIPAPBD SIPKD	APBD MUSRENBANG	RKA
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-MUSRENBANG	MUSRENBANG OPD	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	SPSE SIRUP	RKA	
6	Bagian Organisasi	E-SAKIP	Perjanjian Kinerja DPA	
7	Bagian Administrasi Pembangunan	SMEP	RKA DPA	

4.2. Luaran

Luaran yang dicapai pada pengabdian masyarakat ini adalah laporan akhir Kajian Proses Bisnis dan Arsitektur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lumajang termasuk didalamnya Rekomendasi Proses Bisnis.

Berdasar pada hasil assessment terhadap Tujuh Organisasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019 bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta dengan meninjau beberapa dokumen panduan penggunaan/ user guide/buku manual dari aplikasi aplikasi yang digunakan, maka dapat dilakukan Analisa terhadap system yang belaku sehingga dapat

menghasilkan rekomendasi Bisnis Proses dari Sistem sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 Rekomendasi Bisnis Proses Model Pemerintah Kabupaten Lumajang.



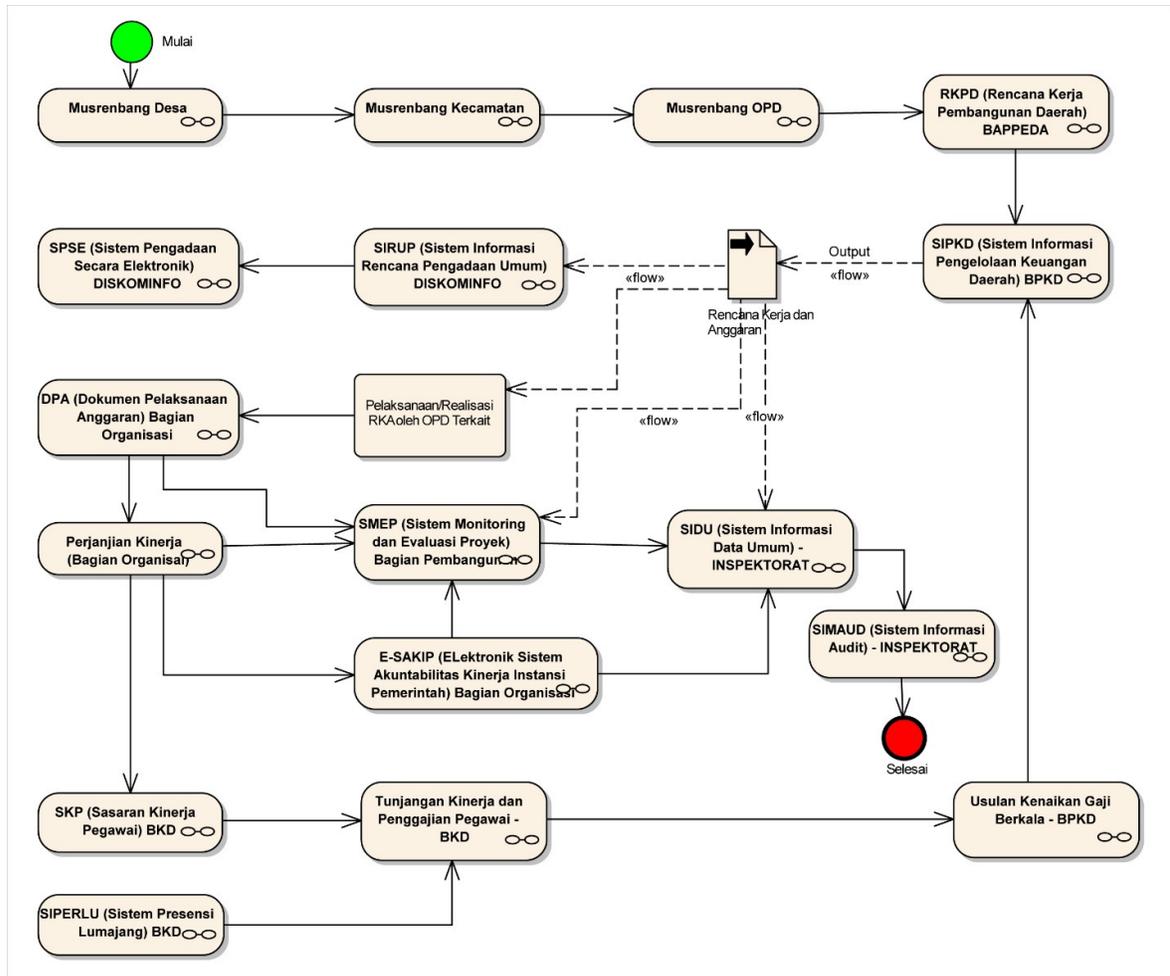
Gambar 4.1 Rekomendasi Bisnis Proses Model Pemerintah Kabupaten Lumajang

Dari Gambar 4.1 diatas dijelaskan alur dan keterkaitan antar OPD maupun Aplikasi sebagai berikut :

1. Bisnis Proses dimulai dari Proses Musrenbang Desa yang berupa usulan kegiatan yang terangkum dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. Usulan kegiatan di ajukan ke jenjang Musrenbang Kecamatan.
2. Musrenbang Kecamatan mendapat input dari Usulan Musrenbang Desa yang berada pada wilayahnya. Musrenbang Kecamatan melakukan pengelompokan prioritas usulan musrenbang desa dan melakukan verifikasi dan rekomendasi. Sebelum menjadi usulan kegiatan kecamatan dilakukan pengelompokkan berdasar bidang kegiatan yang di ajukan ke OPD terkait (masing-masing bidang kegitan).
3. Musrenbang OPD mendapat inputan dari Musrenbang kecamatan dan melakukan verifikasi usulan kegiatan kecamatan. Rekomendasi Tim Teknis menjadi pertimbangan sebagai Usulan Kegiatan OPD pada Musrenbang OPD Terkait yang di unggah untuk mendapat persetujuan dari OPD BAPPEDA.
4. Musrenbang BAPPEDA melakukan verifikasi atas usulan kegiatan yang diajukan oleh semua OPD berdasar rekomendasi Tim Teknis Bappeda. Hasil verifikasi dan rekomendasi akan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di kirimkan ke OPD Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk memperoleh alokasi dana pembangunan.
5. Output RKPD menjadi masukkan (input) pada aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan pengalokasian dana sehingga menjadi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Realisasi RKA dikirimkan kembali kepada BAPPEDA untuk didistribusikan ke OPD pengusul kegiatan.
6. OPD Terkait melakukan realisasi RKA yang didistribusikan Bappeda sehingga terbentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen ini dikirimkan ke OPD Bagian Organisasi dan mendapatkan Perjanjian Kinerja.
7. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai input dari aplikasi E-SAKIP (Elektronik Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang merupakan bagian dari Aplikasi SiMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian) yang di digunakan di OPD BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
8. Aplikasi E-SAKIP oleh OPD Bagian Organisasi dilakukan penilaian atas kinerja OPD lain terhadap pelaksanaan RKA. Keluaran (output) E-SAKIP selanjutnya menjadi input dari aplikasi SMEP (Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek) yang dimiliki OPD Bagian Pembangunan.

9. OPD Bagian Pembangunan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan OPD lain berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja. Keluaran atau Output dari Aplikasi SMEP digunakan sebagai inputan dari Aplikasi SIDU (Sistem Informasi Data Umum) yang dimiliki OPD Inspektorat.
10. Sedangkan RKA (**dari Nomor 5**) dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika terkait Pengadaan yang akan digunakan sebagai input dari aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
11. Output dari Aplikasi SIRUP digunakan sebagai acuan/input aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan di publish dalam Aplikasi web base LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Output dari SPSE menjadi acuan pelaksanaan RKA.
12. Output dari aplikasi SiMAK (**Nomor 7**) Bagian Kepegawaian dan Output dari Aplikasi SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Lumajang) digunakan untuk menjadi input dari Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai dan Penggajian. Output dari sistem ini digunakan sebagai usulan kenaikan gaji berkala pegawai kepada BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) untuk mendapatkan alokasi pendanaan.
13. Output Aplikasi SIDU (**Nomor 9**) digunakan sebagai input dari aplikasi SIMAUD (Sistem Informasi Audit) yang dilakukukan oleh Inspektorat

Lebih singkatnya berikut di gambarkan alur bisnis proses dan intregasi data dari aplikasi yang digunakan OPD Kabupaten Lumajang seperti terlihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2 Bagan Alur Bisnis Proses dan Integrasi Aplikasi

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

Dengan selesainya dokumen Kajian Proses Bisnis dan Arsitektur TIK di Kabupaten Lumajang ini, diharapkan akan diperoleh tahapan dan arahan yang jelas terkait pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sebesar-besarnya layanan kepada masyarakat. Melalui proses bisnis terpadu, dan dibantu dengan bantuan teknologi, perangkat mobile, jaringan cloud negara hingga kecerdasan buatan, maka aktifitas kependudukan, perijinan, kependidikan, kesehatan di Kabupaten Lumajang dapat berlangsung lebih mudah, murah, cepat, transparan, terpadu dan aman. Dengan demikian layanan administrasi kepada masyarakat, layanan khusus untuk dunia usaha dan masyarakat dapat berlangsung dengan efektif, efisien dan membawa manfaat yang berkesinambungan. Dengan demikian, sinergi yang baik antara akademisi, pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.

Sebagai langkah awal kajian proses bisnis dan arsitektur, jelas masih perlu upaya-upaya perbaikan dan pengembangan selaras dengan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi. Berdasarkan transformasi ke arah digitalisasi dari pelaku pemerintahan menjadi urgen untuk dilakukan secara cepat, sehingga semua pelaku bisa berperan bertahap dalam proses bisnis dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Master Plan dan Roadmap Teknologi Informasi Kabupaten Lumajang, Tahun 2018 - 2019
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Lumajang, Tahun 2017 - 2022 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
7. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi
9. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi.
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan



